

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA
PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RANDI GUSYONO

NIM. 11527103008

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**”, yang ditulis oleh:

Nama : **RANDI GUSYONO**

NIM : **11527103008**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dapat disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau

Pekanbaru, 08 September 2020

Pembimbing,

(FIRD AUS, SH. MH)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI No. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan” yang ditulis oleh :

Nama : **RANDI GUSYONO**
 NIM : 11527103008
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
FIRDAUS, SH., MH.

Sekretaris
JONI ALIZON SH.

Penguji
Dr. H. ERMAN GANI, M.Ag

Penguji II
H. Mhd. KASTULANI, SH., MH.

.....



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

KER
NOM
dimu
yang
kare
kon
baik
yang
hak-
men
mela
adal
pasie
serta
terha
huku
tinja
Nom
pene
jelas
Und
kera
Tent
ruma
unda
ke p
atau
dike
terse
men
piha
seca
pasie
dapa
sami
men

Saat ini sering terjadi bahwa data atau kondisi pasien dipublikasi atau dimuat di media elektronik dan media sosial lainnya, tanpa sepengetahuan si pasien yang bersangkutan. Hal ini tentunya dapat merugikan pasien atau keluarganya, karena apa yang dipublikasikan tersebut belum tentu benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di samping itu juga dapat merugikan reputasi atau nama baik seseorang, yang seharusnya harus dilindungi dan dijaga hak-hak dari pasien yang bersangkutan. Ketika seseorang melanggar hak-hak orang lain, termasuk hak-hak pasien maka yang bersangkutan dapat menuntut orang yang mempublikasikan berita yang tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan, melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya terhadap pihak yang membuka data pasien ke publik, adalah dapat melakukan penuntutan secara pidana dan secara perdata. Secara pidana pihak yang membuka rahasia pasien tersebut dapat dipersalahkan sudah melakukan pencemaran nama baik dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Di samping itu juga dapat diajukan tuntutan perdata ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti kerugian akibat dari pencemaran nama baik tersebut.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2020

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Pengertian Tentang Hukum.....	12
B. Peraturan Perundang-undangan.....	17
 BAB III : KONSEP TEORITIS	
A. Pengertian Kerahasiaan	33
B. Penyebaran Informasi.....	34
C. Pengertian Pasien	35
D. Pengertian Kesehatan	37
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	40
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pasien atau Keluarganya Terhadap Pihak yang Membuka Data Pasien Ke Publik.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Salah satu hak warga negara Indonesia yang harus dilindungi adalah hak pribadi yang berhubungan dengan kerahasiaan data pribadi seseorang, yang tidak boleh diekspos oleh setiap orang, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengeskpos data pribadi seseorang, setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjelaskan, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa seseorang berhak untuk dilindungi diri pribadinya, kehormatan, nama baik dan sebagainya dari hal-hal yang dapat merugikan seseorang. Sehingga setiap orang perlu memperhatikan hak-hak pribadi orang lain, jangan sampai hak-hak pribadi orang lain tersebut terlanggar, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

¹Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Di samping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban-kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.³

Dengan adanya dua hak yang bergandengan tersebut, maka seseorang tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang.

²Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³Kartasapoetra, *Sistimatika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa bagi seseorang harus memperhatikan kewajibannya, yakni menjaga agar jangan sampai melanggar hak-hak orang lain. Apabila hak-hak orang lain tersebut terlanggar, maka yang bersangkutan dapat dituntut atas kerugian yang timbul dari pelanggaran hak tersebut.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini disebut juga sebagai isi dari hak.
4. Apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan seseorang itu, merupakan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.⁴

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan itu merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.55

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman, bahwa seseorang harus memperhatikan hak orang lain, karena menjaga hak orang lain tersebut adalah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk memperhatikan dan jangan sampai melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain tersebut.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang kewajiban dokter dan dokter gigi menjaga rahasia kedokteran. Ayat (2) Pasal ini menyatakan bahwa, “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatur kewajiban setiap rumah sakit menjaga kerahasiaan kedokteran. Ayat (2) mengatur hal senada dengan rumusan undang-undang tentang praktik kedokteran. Rumah sakit hanya dapat membuka data pasien untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, mewajibkan setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan menyimpan rahasia penerima layanan kesehatan. Ayat (2) pasal ini menegaskan bahwa rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan aparat penegak hukum, permintaan penerima layanan kesehatan, atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dibahas dalam tulisan ini menyatakan, bahwa data pasien hanya bisa dibuka dalam hal untuk kepentingan pasien, permintaan penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan undang-undang. Selain dari alasan tersebut di atas, maka data pasien harus dirahasiakan, karena berhubungan dengan reputasi dan dan nama baik pasien dan keluarganya.

Sebagaimana halnya dengan data pribadi dari seorang pasien di rumah sakit. Tidak dibenarkan menyebarkan informasi pribadi dari pasien, seperti nama, alamat, dan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pasien berhak untuk meminta kepada dokter atau pelayan kesehatan untuk merahasiakan kondisi kesehatannya kepada publik, karena dapat merusak reputasi atau nama baiknya atau nama baik keluarganya.

Saat ini sering terjadi bahwa data atau kondisi pasien dipublikasi atau dimuat di media elektronik dan media sosial lainnya, tanpa sepegetahuan si pasien yang bersangkutan. Hal ini tentunya dapat merugikan pasien atau keluarganya, karena apa yang dipublikasikan tersebut belum tentu benar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di samping itu juga dapat merugikan reputasi atau nama baik seseorang, yang seharusnya harus dilindungi dan dijaga hak-hak dari pasien yang bersangkutan.

Ketika seseorang melanggar hak-hak orang lain, termasuk hak-hak pasien maka yang bersangkutan dapat menuntut orang yang mempublikasikan berita yang tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan, melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan, bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui, bahwa pasien yang dibuka datanya ke publik dapat melakukan penuntutan ganti rugi, karena dengan pemberitaan tersebut tidak saja merugikan dirinya saja tetapi juga dapat merugikan keluarganya.

Data pribadi pasien tidak boleh dibuka ke publik kecuali atas permintaan pasien sendiri atau karena hal-hal lain sebagaimana yang dijelaskan di atas, tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maka data pasien harus tetap dirahaskan, dan apabila ada pihak-pihak yang mempublikasikan ke publik, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum karena sudah melanggar ketentuan undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah kajian yuridis apabila ada orang yang membuka rahasia pasien, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat merugikan pasien atau keluarga pasien. Oleh karena itu tentunya pasien dan keluarga pasien dapat menuntut seseorang yang membuka rahasia pasien tersebut, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan mengambil judul penelitian: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak pasien, rahasia data pasien yang harus dijaga oleh pelayan kesehatan dan pihak lain, kerugian yang dialami oleh pasien, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pasien dalam menuntut ganti rugi terhadap publikasi kerahasiaan data pasien.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya terhadap pihak yang membuka data pasien ke publik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya terhadap pihak yang membuka data pasien ke publik.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai penerapan peraturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,⁶ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁷

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya terhadap pihak yang membuka data pasien ke publik.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.⁸ Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).⁹ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷*Ibid.*

⁸Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer,¹¹ yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,¹² yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹³ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid*, h.143

peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,¹⁴ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, yang berisi pengertian tentang hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB III TINJAUAN TEORITIS, yang berisi pengertian kerahasiaan, penyebaran informasi, pengertian pasien, dan pengertian kesehatan.

BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni mengenai tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya terhadap pihak yang membuka data pasien ke publik.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Tentang Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Di sini terkandung makna bahwa segala sesuatunya dilaksanakan hukum dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945. Bingkai hukum yang diletakkan dalam melaksanakan roda kenegaraan dan pemerintahan merupakan dasar yang tidak boleh dilalaikan, karena bingkai tersebut merupakan garis yang harus diikuti oleh semua warga Negara dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹⁵

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik tersebut sebaik-baiknya.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah yang telah ditentukan.¹⁶

Demikianlah hukum diperuntukkan sebagai barometer atau alat ukur untuk menentukan apakah hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya berjalan sesuai dengan kaedah atau tidak. Apabila dalam hubungan tersebut terjadi kerugian di antara salah satu pihak tentunya hukum dapat menjaga agar hak dan kewajiban tersebut dapat berjala sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan.

Hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Apabila hak

¹⁶*Ibid*, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi konflik dalam hubungan tersebut, tetapi apabila hak dan kewajiban tidak dapat dilakukan dengan baik dalam hubungan tersebut, maka sudah dapat dipastikan konflik akan muncul, di sinilah perlunya hukum untuk menentukan ketimpangan antara hak dan kewajiban tersebut.

Di samping itu hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, seperti sekeping mata uang, karena hukum diperuntukkan dan berlaku bagi seorang individu dalam suatu masyarakat sebagai pengatur diri dalam bertingkah laku dan perbuatan. Oleh karena itu berlakunya hukum sangat ditentukan oleh hati nurani yang paling dalam dari seorang individu, dengan demikian sangat berhubungan dengan moral seorang individu yang bersangkutan.

Hukum itu obyeknya adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Adapun perbandingan antara hukum dan moral adalah apabila hukum mengatur semua perbuatan lahir, maka yang mengatur perbuatan bathin adalah kaidah-kaidah lain yaitu kaidah moral atau kesusilaan.¹⁷

Hukum menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, kesusilaan justeru berperan menyempurnakan kehidupan manusia itu. Hukum bekerja dengan dipaksakan, sedangkan kesusilaan berlaku atas dasar kesadaran diri manusia.

¹⁷Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karena itu maka moral seseorang sangat menentukan tingkat kesadarannya untuk mengikuti aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum itu tumbuh dalam diri setiap individu apabila moralnya sudah dianggap baik dan sempurna, apabila moral seorang individu masih labil maka akan sulit baginya untuk menumbuhkan rasa kesadarannya terhadap hukum.

Asas moral dari hukum yang paling umum adalah berbunyi: lakukanlah yang baik, hindarkanlah yang jahat. Selanjutnya, hiduplah secara terhormat, jangan merugikan orang lain, berikanlah kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya. Asas-asas tersebut disusul pula dengan perintah-perintah moral yang lebih terperinci, seperti jangan membunuh, jangan berdusta dan sebagainya. Sejak zaman Romawi prinsip-prinsip moral tersebut dipandang sebagai hukum kodrat.¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum dan moral seorang individu harus berjalan secara bersamaan, karena apa yang diharuskan oleh hukum tersebut secara moral harus diikuti oleh setiap diri pribadi seseorang. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan maka sudah dapat dipastikan bahwa berjalannya hukum tersebut sulit untuk mencapai tujuannya.

Intinya hukum merupakan pedoman atau bingkai yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh setiap orang. Apabila seseorang tidak mengindahkan aturan itu, maka ia akan berhubungan dengan sanksi, dengan berbagai macam dan bentuknya sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan tersebut.

¹⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian maka hukum itu dibentuk untuk mengatur tatanan kehidupan manusia agar teratur, tertib dan aman. Barangsiapa yang melanggar aturan hukum tersebut, maka akan dikenai sanksi.

Dengan demikian, maka ciri-ciri hukum adalah:

- a. Adany perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh dan ditaati oleh setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum.¹⁹

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan demikian maka tujuan hukum adalah jelas untuk keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu setiap manusia yang

¹⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1989), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan hukum, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di muka hukum.

Sumber hukum itu ada dua yaitu:

1. Sumber hukum material, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Dari hal-hal tersebut dapat memunculkan aturan hukum.
2. Sumber hukum formal, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang
 - b. Kebiasaan
 - c. Jurisprudensi
 - d. Traktat
 - e. Pendapat sarjana hukum.²⁰

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dilihat, bahwa sumber hukum dapat dari berbagai segi dan asalnya. Hukum muncul dari kondisi yang berkembang dalam masyarakat, dan setiap kejadian dalam masyarakat dapat memunculkan hukum baru, yang bertujuan untuk mengatur kondisi yang berkembang dalam masyarakat tersebut. sedangkan menurut bentuknya merupakan sumber hukum yang sudah ada dan sudah berkembang dalam tatanan hukum nasional.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada beberapa macam dan tingkatan, yaitu sebagai berikut:

²⁰*Ibid*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar merupakan dasar bagi suatu pemerintahan dalam melaksanakan roda pemerintahan, yang mengatur dan menentukan garis-garis besar tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara, dan berisi kesepakatan pendiri negara, yakni sistem pemerintahan, bentuk negara, serta pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia. Setiap konstitusi atau UUD pasti harus ada mengatur mengenai hak-hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar bagi manusia dan warga negara.

Undang-Undang Dasar merupakan peraturan negara yang tertinggi dalam suatu negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan-peraturan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh suatu negara.

Konstitusi atau UUD merupakan suatu fundamen atau arah dari suatu roda kenegaraan yang akan dijalankan, dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dalam negara, karena dalam suatu negara terdapat banyak pusat-pusat kekuasaan. Oleh karena itu para pendiri negara sepakat untuk membatasi kekuasaan tersebut dalam suatu aturan.

Menurut Chairul Anwar, konstitusi adalah *fundamental laws* tentang pemerintahan negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Mempunyai fungsi khas untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan serta gagasan konstitusional.²¹

²¹ Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999), h.3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan, bahwa sejak zaman Yunani Purba istilah konstitusi telah dikenal, hanya konstitusi itu masih diartikan materiil karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah *politeia* dan *nomoi*. *Politeia* diartikan sebagai konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah Undang-Undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa *politeia* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada *nomoi*, karena *politeia* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi* kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai.²²

Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasarnya mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern”, baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya “Sistem Demokrasi Perwakilan dan Konsep Nasionalisme”. Demokrasi Perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran Lembaga Legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukkan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari pada raja, sekaligus terkandung maksud memperkuat Lembaga Perwakilan Rakyat.

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSH Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983), h.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Perancis) yang berarti membentuk.²³ Dengan pemakaian istilah konstitusi tersebut, maka yang dimaksud pembentukan di sini ialah pembentukan suatu negara, menata dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata *constitute* dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara; Dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (*fundamental*) mengenai soko guru-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”.²⁴ Suatu sendi atau pokok peraturan dari negara ini tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan negara tetap berdiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara.

Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang, dan

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), h.10.

²⁴ *Ibid*, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

grond berarti tanah/dasar. Untuk menyebut pengertian tersebut dalam kalangan orang Indonesia, di samping istilah Undang-Undang Dasar, lazim pula dipergunakan istilah konstitusi. Demikian juga halnya dengan orang Belanda di samping istilah *grondwet* mengenal pula istilah *constitutie*.

Undang-Undang Dasar, ialah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan daripada suatu negara yang lazim kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal, dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya.²⁵

Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sebenarnya sudah dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector Republik Inggris 1649-1660) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai *Instrument of Government*, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar.²⁶

Di Indonesia istilah konstitusi, paralel dengan istilah dalam bahasa Inggris *constitution*, yang dalam kenyataannya juga dipergunakan dalam beberapa pengertian, yang sedikitnya telah dipergunakan dalam 3 (tiga) pengertian. Pengertian pertama dan kedua, ialah dipergunakan dalam

²⁵ Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h.27

²⁶ Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum...., Op Cit.*, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian-pengertian yang sama seperti dikemukakan oleh Wheare tersebut di atas, yaitu dalam pengertian yang luas dan dalam pengertian yang sempit.

Sedangkan pengertian yang ketiga yaitu sebagaimana yang diterangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pada Bagian Umum Angka I, dalam alinea pertama mengemukakan sebagai berikut: “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak ditulis.”

Kemudian di bagian lain dari Penjelasan tersebut, yaitu pada bagian tentang Sistem Pemerintahan Negara, pada pokok pikiran II, mengemukakan bahwa: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme belaka (*machts-staat*).”²⁷

Dari kedua kalimat tersebut istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada pengertian hukum dasar, yaitu lebih luas dari Undang-Undang Dasar, tetapi jelas lebih sempit dari yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara, karena di sini hanya mencakup aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dasar-dasar saja.

²⁷ Lihat Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi berisi garis-garis besar tugas, wewenang dan kewajiban lembaga- lembaga negara yang dalam suatu pemerintahan. Kemudian garis-garis besar dari tugas-tugas lembaga negara tersebut dijabarkan dalam bentuk undang-undang.

2. Undang-Undang (UU)

Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang mempunyai dua arti, yakni undang-undang dalam arti formal, dan undang-undang dalam arti materil. Undang-undang dalam arti formal, adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen). Sedangkan undang-undang dalam arti materil, yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.²⁸

Undang-undang atau perundang-undangan (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

²⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya Presiden), dan selanjutnya dibahas diantara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Undang-undang merupakan penjabaran dari UUD atau Konstitusi untuk lebih menjelaskan secara detail mengenai sesuatu yang belum diatur secara terperinci dalam UUD. Undang-undang dirumuskan bersama oleh Presiden dan DPR, dengan mempertimbangkan secara cermat bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang tersebut memang dibutuhkan dalam rangka memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) diatur dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dari pasal tersebut di atas dapat dipahami, maka Presiden baru dapat mengeluarkan Perpu apabila memang sudah ada dan sudah terjadi ihwal kepentingan yang memaksa, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau memberikan kondisi yang kondusif dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang.

Perpu ditandatangani oleh presiden. Setelah diundangkan, perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan RUU tentang Penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU.

DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Undang-undang biasanya belum memberikan penjelasan yang mendetail mengenai sesuatu hal, dengan demikian maka dalam peraturan pemerintah hal tersebut dijelaskan, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik, daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keputusan Presiden

Presiden berhak mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus, yang belaku atau mengatur sesuatu hal tertentu saja, untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

Keputusan Presiden (Keppres) berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres). Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai (contoh: Keppres No. 6/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Ir. Cacuk Sudarjanto sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Sedangkan Peraturan Presiden adalah norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus menerus (contoh: Perpres No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan).

Jadi Keputusan Presiden berbeda dengan Peraturan Presiden karena sifat dari keputusan adalah konkret, individual dan sekali selesai, sedangkan sifat dari peraturan adalah abstrak, umum dan terus-menerus.

Keputusan Presiden berisi hal-hal khusus yang mengenai sesuatu hal yang sifatnya menjelaskan dan melaksanakan ketentuan undang-undang. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, maka sesuatu yang belum jelas dalam undang-undang, maka dijelaskan Keputusan Presiden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan hierarki yang paling bawah dari peraturan perundang-undangan, yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menyusun pemerintahan daerah, dan menggali sumber-sumber yang ada di daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Walaupun demikian fungsi dan peranannya cukup kuat karena dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD yang disahkan secara bersama-sama, dan diundangkan dalam lembaran daerah dan berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tingkatannya, yakni Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan sesuatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu suatu peraturan daerah perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan atau kendala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan suatu Ranperda sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kegiatan, harus memiliki dampak positif baik dari segi ekonomi, politik maupun social budaya masyarakat. Pandangan ini sebagai konsep untuk menuju suatu daerah yang damai, aman dan sejahtera.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, demikian bunyi dari Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masalah pendidikan adalah:

- a. Pasal 18 ayat (4): “Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- b. Pasal 18 ayat (5): “Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah (pusat)”.
- c. Pasal 18 ayat (6): “Pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 237 disebutkan pula bahwa:

- (1) Asas pembantuan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 238 disebutkan pula:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah agar tidak terjadi penyimpangan, dan untuk menyeragamkan semua Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di lingkup Pemerintah Indonesia.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan peraturan yang lebih tingkatannya, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut. Garis-garis besar yang termuat dalam peraturan daerah merupakan rujukan atau implementasi dari peraturan yang berada di atasnya. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah tersebut harus diperhatikan sinkronitas dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut.



BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Pengertian Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Hal yang disembunyikan tersebut disebut dengan rahasia, dan kerahasiaan sering kali bersifat kontroversial.

Rahasia mempunyai beberapa arti yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain.
2. Sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang.
3. Sesuatu yang tersembunyi.
4. Cara yang setepat-tepatnya (biasanya tersembunyi atau sukar diketahui.
5. Sesuatu yang di percayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
6. Secara diam (sembunyi-sembunyi), tidak secara terang-terangan, tentang perkumpulan dan sebagainya.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Rahasi kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka

penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁹

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa dalam dunia kedokteran maka data atau informasi mengenai pasien harus dirahasiakan oleh dokter atau pihak rumah sakit, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal di atas.

B. Penyebaran Informasi

Keberadaan perangkat digital dan akses internet yang terjangkau membuat berbagai kalangan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Penyebaran informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dengan eksisnya media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Media sosial merupakan sebagai aplikasi online yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi.

Di Indonesia, media sosial berupa jejaring sosial berkembang sangat masif menjadi sumber informasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Realita yang terjadi, informasi apapun sangat cepat menjadi viral dalam sekejap saja, dengan satu klik dan share akan langsung menyebar secara masif.

²⁹Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

C. Pengertian Pasien

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan, bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Selanjutnya dalam Pasal 52 disebutkan, bahwa Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d. Menolak tindakan medis.
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

Dalam Pasal 53 disebutkan pula, bahwa Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa pasien dalam mendapatkan pelayanan dari dokter mempunyai hak dan kewajiban secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang, maka pelayanan yang diberikan kepada pasien tersebut harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Identitas pengadu.
 - b. Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan, dan
 - c. Alasan pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.³⁰

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa pasien atau siapa saja yang merasa dirugikan karena praktik dokter, maka yang bersangkutan dapat melaporkan hal tersebut kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, atau kepada pihak yang wajib apabila ada indikasi

³⁰*Ibid.*

pelanggaran pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

D. Pengertian Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan, bahwa Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan pula, bahwa pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.³¹

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dilihat, bahwa Rumah Sakit merupakan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan, bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara

³¹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.³²

Sedangkan pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.³³

Pasal 3 undang-undang tersebut juga menjelaskan, bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

³²Pasal 1 angka 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

³³Pasal 1 angka 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 5 undang-undang tersebut juga menjelaskan, bahwa:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.³⁴

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima berdasarkan standar kesehatan yang berlaku. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

³⁴*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sesuatu yang harus dipegang oleh dokter, perawat atau rumah sakit, dan tidak dibolehkan untuk diekspos ke publik, kecuali undang-undang membenarkannya. Bagi pihak-pihak yang membuka rahasia data pasien ke publik jelas melanggar undang-undang, karena bagi pasien yang bersangkutan atau keluarganya merupakan suatu yang harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh umum, karena dapat saja rahasia data pasien yang dibuka ke publik tersebut, merusak nama baik mereka atau mereka tidak menginginkan orang lain mengetahui mengenai kondisi diri dan kesehatannya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya terhadap pihak yang membuka data pasien ke publik, adalah dapat melakukan penuntutan secara pidana dan secara perdata. Secara pidana pihak yang membuka rahasia pasien tersebut dapat dipersalahkan sudah melakukan pencemaran nama baik dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Di samping itu juga dapat diajukan tuntutan perdata ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti kerugian akibat dari pencemaran nama baik tersebut.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak rumah sakit, dokter, perawat dan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab, tidak dibenarkan membuka rahasia atau data pasien ke publik, tanpa sepengetahuan pasien yang bersangkutan atau keluarganya, kecuali ditentukan bahwa oleh undang-undang bahwa data pasien tersebut dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu.
2. Bagi pasien atau keluarganya harus benar-benar dapat mempertahankan hak tersebut, karena hak itu adalah hak pribadi pasien, sehingga yang bersangkutan dapat mempermasalahkan apabila data pasien tersebut di ekspos ke publik tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Gorys Keraf, Komposisi, *Nusa. Indah*, Jakarta, 1989
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1991
- Kartasapoetra, *Sistimatika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1998
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PSH FH UII, Yogyakarta, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- S.F. Marbun dkk (penyunting), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI No. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan" yang ditulis oleh :

Nama : **RANDI GUSYONO**
NIM : 11527103008
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daritg

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

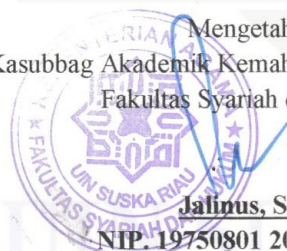
Ketua
FIRDAUS, SH., MH.

Sekretaris
JONI ALIZON SH.

Penguji
Dr. H. ERMAN GANI, M.Ag

Penguji II
H. MHd. KASTULANI, SH., MH.

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RANDI GUSYONO

NIM : 11527103008

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

Pembimbing: Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



RANDI GUSYONO, anak empat dari pasangan suami istri **SYAHBIRIN** dan **Almh. GUSMANIAR**. Penulis dilahirkan di Tapi Selo tanggal 10 Juni 1996. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 49 Lareh Nan Gadang di Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lintau Buo, Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi ke Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan, penulis pada bulan September 2020 di dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**